

**RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA**

**SEKRETARIAT DPRD  
TAHUN 2024**



**PEMERINTAH KOTA BEKASI  
PROVINSI JAWA BARAT**

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami Panjatkan Kehadirat Allah SWT karena atas rahmat dan karunianya, Rancangan Akhir Rencana Kerja (RANKHIR RENJA) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2024 dapat diselesaikan. Rancangan Akhir Rencana Kerja yang disusun oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi merupakan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya pada Tahun 2024. Rancangan Akhir Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi diharapkan dapat memberikan arahan sekaligus menjadi acuan bagi kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi dalam mencapai tujuan organisasi sesuai dengan Rencana Pembangunan Daerah serta arahan kebijakan yang telah ditetapkan, sehingga seluruh daya dan upaya yang akan dilakukan dapat berjalan secara sinergis dalam satu pola sikap dan tindak.

Rancangan Akhir Rencana Kerja (RANKHIR RENJA) juga merupakan sebagai landasan operasional penyusun program dan kegiatan prioritas pada Tahun 2024 dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bekasi pada Tahun 2022.

Kepada semua pihak yang telah mengerahkan tenaga dan pikirannya dalam penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja (RANKHIR RENJA) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2024 ini kami sampaikan ucapan terima kasih. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk dan memberkahi langkah serta upaya kita dalam meningkatkan kinerja guna mewujudkan **Rencana Pembangunan Daerah**.

Ditetapkan di Bekasi

Pada tanggal 2023  
SEKRETARIS DPRD KOTA BEKASI



Drs. HANAN, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19640424 199011 1 002

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
<b>BAB I    PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
I.1       Latar Belakang	1
I.2       Landasan Hukum	2
I.3       Maksud dan Tujuan	5
I.4       Sistematika Penulisan	6
<b>BAB II    HASIL EVALUASI RENJA SEKRETARIAT DPRD KOTA BEKASI           TAHUN 2022</b>	<b>10</b>
II.1       Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2022 dan Capaian Renstra Sekretariat DPRD Kota Bekasi	10
II.2       Analisis Kinerja Sekretariat DPRD Kota Bekasi	13
<b>BAB III   TUJUAN DAN SASARAN SEKRETARIAT DPRD KOTA BEKASI</b>	<b>18</b>
III.1       Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	18
III.2       Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2024	20
III.3       Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Bekasi	29
III.4       Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat DPRD Kota Bekasi	45
<b>BAB IV    RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DPRD KOTA           BEKASI</b>	<b>48</b>
IV.1       Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD Kota Bekasi	48
<b>BAB V     PENUTUP</b>	<b>90</b>
Penutup	90

## **BAB I**

### **PENDAHULULAN**

#### **I.1. Latar Belakang**

Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (UU-SPPN) mengamanatkan bahwa setiap pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPjMD) yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai Rencana Tahunan. Dalam menyusun dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2022 mengacu pada Peraturan Wali kota Bekasi Nomor 100 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organissi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi. RKPD Kota Bekasi Tahun 2024 berfungsi sebagai dokumen Perencanaan Tahunan dan penyusunannya memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang Tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Rancangan Akhir RENJA Perangkat Daerah.

Sesuai amanat tersebut, maka Sekretariat DPRD Kota Bekasi sebagai Perangkat Daerah pada Tahun 2023 menyusun Rancangan Akhir Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2024.

Rancangan Akhir Rencana Kerja (RANKHIR RENJA) Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2024 dibuat berdasarkan Rancangan Akhir RENSTRA Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2024-2026 yang mengacu pada Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 08 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023.

Rancangan Akhir Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2024 memuat permasalahan-permasalahan yang belum dapat di selesaikan dan memuat Program/ Kegiatan Prioritas Pembangunan yang

akan di laksanakan dalam kurun waktu 1 (satu) Tahun berjalan.

Rancangan Akhir Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat DPRD Kota Bekasi tahun 2024 diharapkan dapat menjadi pedoman bagi seluruh Aparat Sekretariat DPRD Kota Bekasi untuk melaksanakan tugasnya menjalankan Program dan Kegiatannya guna mencapai target Kinerja yang telah di tetapkan sebelumnya di dalam Rencana Strategis (RENSTRA) dan dapat tercapai dengan baik serta diharapkan pula dapat terpantau dan terevaluasi sejauh mana pencapaian Tujuan dan Sasaran dari tahun ke tahun sehingga dapat dilakukan koreksi jika terjadi perkembangan baru dilingkungan strategis yang perlu ditindaklanjuti atau di antisipasi.

Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun 2024 merupakan proses penetapan Kegiatan Tahunan yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan RKPD dan Indikator Kinerja berdasarkan Program Kebijakan dan Sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya dalam RENSTRA Sekretariat DPRD Kota Bekasi dan menentukan target yang realistis, oleh karena itu dalam Rencana Kerja ini dicantumkan Program dan Kegiatan yang terinci untuk Jangka Pendek sebagai pedoman dan sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi serta langkah-langkah Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam upaya pencapaian target, sehingga capaian target apa saja yang belum tercapai pada tahun 2018-2023.

## **I.2. Landasan Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah perubahan ketiga dengan Undang -

- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara No. 6323);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
  8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2019, Tambahan Lembar Negara No. 6402) status mengubah Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
  11. Menteri Negara Riset Dan Teknologi Republik Indonesia Dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Peraturan Bersama Menteri Negara Riset Dan Teknologi Republik Indonesia Dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 03 Tahun 2012 Nomor: 36 Tahun 2012 Tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah

- (SiDa) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 484);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
  16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
  18. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
  19. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang

- Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi;
20. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bekasi Tahun 2011-2031;
  21. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Bekasi tahun 2005-2025 (Lembaran Kota Bekasi Tahun 2013 Nomor 10 SERI E);
  22. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 01 Tahun 2022 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
  23. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 09 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi.
  24. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 01.A Tahun 2021 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 1.A Seri E);
  25. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 14 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 14 Seri E);
  26. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 11.A Tahun 2021 tentang Kelembagaan Perencanaan dan Penganggaran melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Bekasi;
  27. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor ..... Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Bekasi Tahun 2024-2026;
  28. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor ..... Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Pemerintah Daerah Tahun 2024;
  29. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor.....Tahun .....tentang kedudukan dan tugas fungsi Perangkat Daerah .....

### **I.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud dari penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi Kota



Bekasi Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 adalah untuk mengetahui:

1. Program dan Kegiatan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi Tahun 2024.
2. Lokasi pelaksanaan Program dan Kegiatan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi Tahun 2024.
3. Indikator Kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi Tahun 2024.
4. Kelompok Sasaran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi.
5. Pagu indikatif Program dan Kegiatan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2024.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Merencanakan Program dan Kegiatan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi Tahun 2023.
2. Mengevaluasi Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi Tahun sebelumnya.
3. Mengetahui masalah, tantangan dan solusi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi Tahun sebelumnya.
4. Perumusan Tujuan dan Sasaran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi Tahun 2024.
5. Sebagai salah satu media pertanggungjawaban melalui penilaian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi.

#### **I.4. Sistematika Penulisan**

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi Tahun 2024 agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

##### **I.1. Latar belakang**

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Rancangan Akhir Rencana Kerja (RANKHIR RENJA) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi Tahun 2024, proses penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja (RENJA), keterkaitan antara RENJA

Sekretariat DPRD dengan dokumen RKPD, RENSTRA Perubahan Sekretariat DPRD, dengan Rencana Kerja K/L dan Rencana Kerja Kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

#### I.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah serta pedoman yang dijadikan tujuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

#### I.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja (RANKHIR RENJA) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi Tahun 2024.

#### I.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Rancangan Akhir Rencana Kerja (RANKHIR RENJA) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi Tahun 2024 serta susunan garis besar isi dokumen.

## **BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022**

### II.1. Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Bab ini memuat kajian (*review*) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun tahun sebelumnya.

### II.2. Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah

ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

### II.3. Isu-isu Penting Penyelenggara Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berisikan uraian mengenai :

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah;
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah; dan
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategi untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang lalu.

### II.4. Review terhadap Rancangan Akhir RKPD

Berisikan uraian mengenai :

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan akhir RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan akhir RKPD, misalnya terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat dalam rancangan akhir RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarnya berbentuk Lampiran table.

## **BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target Renstra Perangkat Daerah.

## **BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DPRD KOTA BEKASI**

Berisikan penjelasan mengenai Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, penjelasan jika program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan akhir RKPD, baik jenis program/ kegiatan, pagu Indikatif, maupun kombinasi keduanya.

Berisikan penjelasan mengenai :

1. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan;
2. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain : jumlah program, dan jumlah kegiatan, sifat penyebaran lokasi lokasi program dan kegiatan dan total kebutuhan dana/ pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaan;
3. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan akhir RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya;
4. Tabel rencana program dan kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan Tabel T-C.33.

## **BAB V PENUTUP**

Menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

**BAB II**  
**HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA**  
**SEKRETARIAT DPRD KOTA BEKASI TAHUN 2022**

**II.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2022 dan Capaian Renstra Sekretariat DPRD Kota Bekasi**

Untuk mencapai keberhasilan RPJMD maka dapat kita dilihat dari capaian indikator yang ada pada RENSTRA Sekretariat DPRD Kota Bekasi yang terdapat pada tabel berikut ini :

**EVALUASI CAPAIAN INDIKATOR KINERJA**  
**SKPD SEKRETARIAT DPRD KOTA PADA RPJMD**  
**MURNI 2018-2023**

NO	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET RENSTRA SKPD					REALISASI CAPAIAN				
			2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Indeks Kepuasan DPRD Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	Indeks	76,61	76,71				76,78	76,98			
	Prosentase Raperda yang disahkan menjadi Perda tepat waktu	Persen (%)	50	50				100	100			
	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	76,61	76,71				82,46	84,71			

**EVALUASI CAPAIAN INDIKATOR KINERJA  
SKPD SEKRETARIAT DPRD KOTA PADA RPJMD  
Perubahan 2018-2023**

NO	INDIKATOR SASARAN	IKU	TARGET RENSTRA SKPD (%)					REALISASI CAPAIAN (%)				
			2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Prosentase Raperda yang disahkan menjadi Perda tepat waktu	Persen (%)			75	75.10	75.20	-	-	87,51	65,22	
	Prosentase Pengesahan Anggaran tepat waktu	Persen (%)	-	-	75	75,1	75,2	-	-	100	100	
	Prosentase pembahasan LKPJ Kepala Daerah tepat waktu	Persen (%)	-	-	75	75,1	75,2	-	-	100	100	
	Nilai Perangkat Daerah AKIP	Nilai			77,4	77,5	77,6	-	-	69,56		

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan oleh Sekretariat DPRD Kota Bekasi dalam jangka waktu 5 tahun yang dijabarkan dalam kegiatan tahunan. Sasaran diusahakan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur. Sasaran harus menggambarkan hasil yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Dalam rangka mencapai misi organisasi.

Kinerja yang telah dicapai pemerintah Kota Bekasi berupa pencapaian sasaran yang menjadi tanggung-jawab Sekretariat DPRD Kota Bekasi. Sasaran yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja terutama target tahun 2021 sebanyak 4 (tiga) buah sasaran. Dengan rincian sebagai berikut:

**A. Prosentase Raperda yang disahkan menjadi Perda tepat waktu**

Perhitungan IKU untuk “Prosentase Raperda yang disahkan menjadi Perda tepat waktu ”dilakukan melalui: Jumlah Raperda yang diusulkan baik itu dari OPD teknis terkait maupun dari aspirasi DPRD di bagi Perda yang disahkan tepat waktu di kali 100 % dan sudah di Paripurnakan. Dan di buat laporannya dalam bentuk Daftar Raperda yang sudah di Paripurnakan.

Berdasarkan pada visi dan misi Kepala Daerah Kota Bekasi Terpilih 2018-2023, maka Sekretariat DPRD Kota Bekasi akan mendukung pelaksanaan visi dan misi Kepala Daerah Terpilih terutama di Misi Pertama yaitu: **“Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan yang baik”** sebagai bentuk tanggung jawab mendukung pencapaian Visi dan pelaksanaan Misi Kepala Daerah Kota Bekasi.

#### **B. Prosentase Pengesahan Anggaran tepat waktu**

Perhitungan IKU untuk “Prosentase Pengesahan Anggaran tepat waktu” dilakukan sesuai dengan Tahapan dan Jadwal Proses Penyusunan APBD sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dimana Penetapan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD sesuai dengan hasil evaluasi, paling lambat akhir November.

#### **C. Prosentase pembahasan LKPJ Kepala Daerah tepat waktu**

Perhitungan IKU untuk “Prosentase pembahasan LKPJ Kepala Daerah tepat waktu” dilakukan sesuai dengan Pasal 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yaitu LKPJ disampaikan oleh kepala daerah dalam rapat paripurna dewan perwakilan rakyat daerah yang dilakukan 1 (satu)

kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

#### D. Nilai AKIP Perangkat Daerah

Perhitungan nilai AKIP terdiri dari Nilai Komponen Perencanaan kinerja + Nilai Komponen Pengukuran Kinerja + Nilai Komponen Pelaporan Kinerja + Nilai Komponen Evaluasi Internal + Nilai Komponen Capaian Kinerja.

## II.2. Analisis Kinerja Sekretariat DPRD Kota Bekasi

### Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Utama Indeks Kepuasan DPRD Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Bekasi.

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2022		Capaian Kinerja Tahun 2022
			Target	Realisasi	
1	Prosentase Raperda yang difinalisasikan menjadi Perda tepat waktu	Indeks	75,10%	65,22%	86,84%

Sumber : Data Olahan Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan, Setwan, 2023

Dengan melihat tabel tersebut diatas bahwa target penyelesaian Raperda TA 2022 yang disahkan menjadi Perda tepat waktu sejumlah 75,10%. Dalam perjalanan target awal pembahasan Raperda di TA 2022 sejumlah 15 Raperda. Namun di bulan Oktober terdapat usulan judul Raperda sehingga target pembahasan Raperda di TA 2021 menjadi 23 Judul.

Pansus yang bertugas menyelesaikan pembahasan ini sudah menyelesaikan 15 judul Raperda sedangkan 8 Raperda tersisa diluncurkan pada Propemperda Tahun Anggaran 2023.

Rumusan dalam menghitung capaian tersebut sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Perda yang disahkan}}{\text{Raperda yang diusulkan}} \times 100\%$$



Target Penyelesaian: 23 judul Raperda

Realisasi: 15 judul Raperda

Perhitungan:  $\frac{15}{23} \times 100\% = 65,22\%$

Realisasi penyelesaian masih di bawah dari target sejumlah 65,22% dengan tingkat capaian sebesar 86,84%

Adapun faktor penyebab tidak tercapainya target tahun 2022 dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain :

- a. Kepadatan jadwal aktivitas dari masing-masing anggota DPRD;
- b. Dinamika dalam pembahasan Raperda sehingga berpengaruh pada penjadwalan dan harmonisasi ke Kanwil Kumham ataupun Biro Hukum Provinsi Jawa Barat;
- c. Antrian proses fasilitasi Raperda di Biro Hukum Provinsi Jawa Barat.

#### **Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Utama Prosentase Pengesahan Anggaran tepat waktu**

No	Indikator Program	Satuan	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Capaian Kinerja Tahun 2020
2	Prosentase Pengesahan Anggaran	Persen	75,10%	100%	133,33%

Sumber : Data Olahan Bagian FPP Setwan, 2022

Dengan melihat tabel tersebut diatas bahwa target penyelesaian pengesahan anggaran TA 2022 tepat waktu sejumlah 100%.

Rumusan dalam menghitung capaian tersebut sebagai berikut:

$$\frac{\text{Pengesahan APBD}}{\text{Pengesahan APBD dan LP2APBD}} \times 100\%$$

Target Penyelesaian: 2 Raperda

Realisasi: 2 Raperda

Perhitungan:  $\frac{2}{2} \times 100\% = 100\%$

Realisasi penyelesaian sesuai dengan target dengan tingkat capaian sebesar 100%

Adapun faktor penyebab keberhasilan pencapaian target tahun 2022 dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain :

- a. Adanya komitmen DPRD dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
- b. Adanya sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya terkait penyampaian, pembahasan dan pengesahan Raperda yang ada.

#### **Analisis Pembahasan LKPJ Kepala Daerah tepat waktu**

No	Indikator Program	Satuan	Target Tahun 2021	Realisasi Tahun 2021	Capaian Kinerja Tahun 2020
3	Prosentase pembahasan LKPJ Kepala Daerah tepat waktu	Persen	100%	100%	133,33%

Sumber : Data Olahan Bagian FPP Setwan, 2022

Dengan melihat tabel tersebut diatas bahwa target penyelesaian pembahasan LKPJ Kepala Daerah TA 2022 tepat waktu sejumlah 100%.

Rumusan dalam menghitung capaian tersebut sebagai berikut:

$\frac{\text{Pembahasan LKPJ}}{\text{Rekomendasi LKPJ oleh DPRD diserahkan tepat waktu}} \times 100\%$

Target Penyelesaian: 1 LKPJ

Realisasi: 1 Dokumen Rekomendasi LKPJ

$$\text{Perhitungan: } \frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$$

Realisasi penyelesaian sesuai dengan target dengan tingkat capaian sebesar 100%

Adapun faktor penyebab keberhasilan pencapaian target tahun 2022 dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain :

- a. Adanya komitmen DPRD dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
- b. Adanya sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya terkait penyampaian, pembahasan dan penetapan Rekomendasi yang ada.

Selain hal tersebut di atas faktor yang menghambat dalam pencapaian target di tahun 2022 adalah Tingginya volume Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD yang dapat mengakibatkan terjadinya perubahan jadwal pembahasan.

#### Analisis Nilai AKIP Perangkat Daerah

No	Indikator Program	Satuan	Target Tahun 2021	Realisasi Tahun 2021	Capaian Kinerja Tahun 2020
4	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	77,50	70,08	90,42%

Sumber : Data Olahan Bagian FPP Setwan, 2021

Dengan melihat tabel tersebut diatas bahwa realisasi nilai AKIP Perangkat Daerah 70,08 dari target nilai 77,50 dengan tingkat capaian 90,42%.

Rumusan dalam menghitung Nilai AKIP sebagai berikut:

Nilai Komponen Perencanaan kinerja + Nilai Komponen Pengukuran Kinerja + Nilai Komponen Pelaporan Kinerja + Nilai Komponen Evaluasi Internal + Nilai Komponen Capaian Kinerja Target

Perhitungan:

No	Komponen Yang Dinilai	2022	
		Bobot	Nilai
1	Perencanaan Kinerja	30	22,29
2	Pengukuran Kinerja	30	20,39
3	Pelaporan Kinerja	15	9,88
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	17,52
	<b>Nilai Hasil Evaluasi</b>	<b>100</b>	<b>70,08</b>

Sumber data: Inspektorat Daerah Kota Bekasi 2022

Adapun faktor penyebab keberhasilan pencapaian target tahun 2021 dipengaruhi oleh komitmen dan sinergitas dari seluruh Aparatur di lingkup Sekretariat DPRD Kota Bekasi.

### BAB III

## TUJUAN DAN SASARAN SEKRETARIAT DPRD KOTA

### III.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Pembangunan nasional dilaksanakan dengan menerapkan prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan nasional. Keberhasilan pelaksanaan pembangunan nasional sangat ditentukan oleh capaian pembangunan seluruh provinsi di Indonesia. Untuk itu perlu dibangun sistem yang terintegrasi dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah di tingkat provinsi, yang selanjutnya didukung dan dipedomani oleh kabupaten/kota.

Guna memberikan arahan bagi pembangunan Nasional Tahun 2023, Pemerintah Pusat telah menetapkan Tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 adalah: "Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan".

Sasaran dan prioritas penyusunan RKPD Tahun 2024 diselaraskan untuk mendukung pencapaian visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden melalui 5 (lima) arahan utama Presiden, sebagai berikut:

1. Pembangunan sumber daya manusia (SDM), membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global;
2. Pembangunan Infrastruktur, melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;

3. Penyederhanaan Regulasi, menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan Undang-Undang Cipta Kerja;
4. Penyederhanaan Birokrasi, memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi dan;
5. Transformasi Ekonomi, melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan sumber daya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Memperhatikan arahan utama Presiden dan tema tersebut diatas, serta guna memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar, terdapat 5 (lima) program prioritas yang berkaitan langsung dengan prioritas pembangunan nasional, yaitu:

1. Infrastruktur pelayanan dasar, Pelayanan ini meliputi penyediaan akses perumahan dan pemukiman layak, aman, dan terjangkau, penyediaan air minum, hingga keselamatan juga keamanan transportasi;
2. Infrastruktur ekonomi. Di dalamnya terdapat konektivitas jalan, kereta api, laut, udara, dan darat;
3. Infrastruktur perkotaan. Yang disasar yaitu transportasi, infrastruktur dan ekosistem teknologi informasi komunikasi (TIK), penyediaan akses air minum dan sanitasi layak, serta akses perumahan dan pemukiman yang layak, aman, juga terjangkau di perkotaan;
4. Energi dan ketenagalistrikan. Program ini meliputi keberlanjutan, akses, serta kecukupan penyediaan energi dan ketenagalistrikan;
5. Transformasi digital yang terdiri atas penuntasan, pemanfaatan, dan fasilitas pendukung transformasi pendukung TIK.

Terdapat beberapa major project yang tetap dilanjutkan pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024, yaitu:

**Prioritas Nasional 1** Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan:

1. Kawasan industri prioritas dan smelter;
2. Pengelolaan terpadu UMKM;
3. Food Estate (Kawasan Sentra Produksi Pangan);
4. Destinasi pariwisata prioritas;
5. Akselerasi pengembangan energi terbarukan dan konservasi energi;

**Prioritas Nasional 2** Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan:

6. di Wilayah Papua, wilayah adat Papua: Wilayah Adat Laa Pago dan wilayah adat Domberay;
7. Pembangunan Ibu Kota Negara;

**Prioritas Nasional 3** Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing :

8. Reformasi sistem perlindungan sosial;
9. Reformasi sistem kesehatan nasional;
10. Reformasi pendidikan keterampilan;
11. Percepatan penurunan kematian ibu dan stunting;

**Prioritas Nasional 5** Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar :

12. Jaringan pelabuhan utama terpadu;
13. Transformasi digital;

**Prioritas Nasional 6** Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim:

14. Pembangunan fasilitas pengolahan limbah B3.

### III.2. Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2024

Prioritas pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 disusun berdasarkan isu strategis serta memuat pokok-pokok pikiran tahunan DPRD Tahun 2021 dan janji

Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, yang tertuang dalam prioritas pembangunan dan arah kebijakan RPJMD Tahun 2018-2023, sehingga keterkaitan prioritas pembangunan daerah dalam RKPD Tahun 2023 dengan arah kebijakan RPJMD untuk Tahun 2023 sangat erat. Terdapat 11 (sebelas) prioritas pembangunan daerah pada Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023. Pada tahun 2020 terdapat kejadian luar biasa yang melanda Provinsi Jawa Barat yaitu pandemi COVID-19 yang diprediksi akan terus berdampak sampai tahun 2023. Berdasarkan isu strategis tahun 2023, maka Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat fokus menangani pandemi COVID-19 dan memasukkan ke dalam prioritas pembangunan daerah tahun 2023. Perumusan prioritas pembangunan disajikan dengan tetap menjaga keterkaitan antara prioritas pembangunan daerah dengan arah kebijakan, isu strategis, dan pokok-pokok pikiran tahunan DPRD. Keterkaitan tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**KETERKAITAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH  
DENGAN ARAH KEBIJAKAN**

No	Prioritas Pembangunan RKPD 2023	Arah Kebijakan Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023
1	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah
2	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah	a. Mengembangkan industri unggulan Jawa Barat, perwilayah industri, sumber daya industri, sarana dan prasarana industri serta meningkatkan pemberdayaan industri. b. Meningkatkan sistem dan



No	Prioritas Pembangunan RKPD 2023	Arah Kebijakan Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023
		<p>jaringan distribusi barang; menjaga stabilitas harga dan ketersediaan stok barang kebutuhan pokok; meningkatkan pemasaran dan penggunaan produk dalam negeri; meningkatkan ekspor dan menjaga neraca perdagangan; revitalisasi atau membangun pasar rakyat; serta perlindungan konsumen</p> <p>c. Meningkatkan kualitas kelembagaan, dukungan pembiayaan usaha dan peningkatan akses pasar (Off Taker dan Promosi)</p> <p>d. Menciptakan iklim usaha yang berdaya Saing</p> <p>e. Meningkatkan kemantapan jalan sampai ke pelosok;</p> <p>f. Membangun prasarana jalan yang menghubungkan wilayah potensial;</p> <p>g. Meningkatkan kapasitas dan keterampilan angkatan kerja yang berbasis digital dan teknologi untuk memenuhi kebutuhan pasar</p>
3	Penguatan Sistem	a. Meningkatkan ketersediaan,

No	Prioritas Pembangunan RKPD 2023	Arah Kebijakan Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023
	Ketahanan Pangan Berkelanjutan	<p>akses dan pemanfaatan pangan bagi masyarakat Jawa Barat serta memperbaiki sistem informasi pangan</p> <p>b. Revitalisasi lahan, dukungan infrastruktur, pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengembangan sumber daya manusia.</p> <p>c. Pengembangan kawasan klaster pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan</p> <p>d. Meningkatkan kinerja jaringan irigasi</p>
4	Reformasi Sistem Perlindungan Sosial	Meningkatkan Perlindungan Sosial bagi Masyarakat Miskin dan/atau terdampak COVID-19
5	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan	a. Meningkatkan Kualitas Pendidikan yang berdaya saing dan mendorong pengembangan pendidikan vokasi yang menjangkau seluruh wilayah melalui pembentukan center of excellence di setiap kabupaten/kota dan pengembangan SMK yang

No	Prioritas Pembangunan RKPDP 2023	Arah Kebijakan Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023
		<p>relevan di kawasan metropolitan;</p> <p>b. Meningkatkan kesejahteraan, kompetensi dan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan menengah melalui sertifikasi kompetensi;</p> <p>c. Pemberlakuan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) penyelenggaraan pendidikan melalui pendidikan jarak jauh, penyediaan e-book gratis di portal pemerintah dengan ditopang kehandalan infrastruktur jaringan TI;</p> <p>d. Meningkatkan minat baca masyarakat melalui pemanfaatan teknologi digital.</p>
6	Reformasi Sistem Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	Meningkatkan pelayanan informasi rawan bencana, pencegahan dan kesiapsiagaan, penyelamatan, dan evakuasi korban, serta sistem dasar penanggulangan bencana
7	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	Memperkuat kelembagaan dan tatalaksana pemerintahan berbasis e-government

No	Prioritas Pembangunan RKPD 2023	Arah Kebijakan Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023
8	Gerakan Membangun Desa	Memperkuat pemerintahan desa
9	Pendidikan Agama dan Tempat Ibadah Juara	Meningkatkan fasilitasi penguatan sumber daya dan lembaga keagamaan serta ekonomi umat
10	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Meningkatkan kemantapan jalan sampai ke pelosok</li> <li>b. Membangun prasarana jalan yang menghubungkan wilayah potensial</li> <li>c. Mengembangkan sistem jaringan transportasi massal perkotaan berbasis jalan dan rel yang aman, nyaman dan terjangkau dan antar moda. dan prasarana transportasi laut, udara, dan kereta api yang berkeselamatan dan menghubungkan wilayah strategis</li> <li>d. Meningkatkan kualitas dan penyediaan air serta kualitas udara</li> <li>e. Meningkatkan kualitas tutupan lahan</li> <li>f. Meningkatkan penyelenggaraan perumahan dan Kawasan Permukiman</li> <li>g. Meningkatkan kualitas</li> </ul>

No	Prioritas Pembangunan RKPDP 2023	Arah Kebijakan Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023
		operasional instalasi tenaga listrik
11	Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Pariwisata	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mengembangkan destinasi pariwisata dan produk wisata serta meningkatkan kualitas ekonomi kreatif</li> <li>Peningkatan promosi pariwisata berbasis digital</li> </ol>

**KETERKAITAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH  
DENGAN ISU STRATEGIS**

No	Isu Strategis	Prioritas Pembangunan Daerah
1	Kualitas nilai kehidupan dan daya saing sumber daya manusia	<ol style="list-style-type: none"> <li>PD1 - Reformasi Sistem Kesehatan Daerah</li> <li>PD5 - Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan</li> <li>PD9 - Pendidikan Agama dan Tempat Ibadah Juara</li> </ol>
2	Kemiskinan, pengangguran, dan masalah sosial	<ol style="list-style-type: none"> <li>PD1 - Reformasi Sistem Kesehatan Daerah</li> <li>PD2 Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Inovasi</li> <li>PD3 Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan</li> <li>PD4 Reformasi Sistem Perlindungan Sosial</li> </ol>
3	Pertumbuhan dan	5. PD8 Gerakan Membangun

	pemerataan pembangunan sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan	Desa 6. PD10 Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
4	Produktivitas dan daya saing ekonomi yang berkelanjutan	1. PD2 - Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Inovasi 2. PD3 - Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan 3. PD8 - Gerakan Membangun Desa 4. PD10 - Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah

**KESELARASAN PRIORITAS PEMBANGUNAN  
PROVINSI JAWA BARAT  
DENGAN PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2023**

No	Isu Strategis	Prioritas Pembangunan Daerah
1	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Inovasi 2. Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan 3. Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 4. Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Pariwisata

2	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup</li> <li>2. Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan</li> <li>3. Gerakan Membangun Desa</li> <li>4. Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Pariwisata</li> </ol>
3	Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan</li> <li>2. Reformasi Sistem Kesehatan Daerah</li> <li>3. Reformasi Sistem Perlindungan Sosial</li> <li>4. Pendidikan Agama dan Tempat Ibadah Juara</li> </ol>
4	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan</li> <li>2. Pendidikan Agama dan Tempat Ibadah Juara</li> </ol>
5	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup</li> <li>2. Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Pariwisata</li> </ol>
6	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan</li> </ol>

	Perubahan Iklim	Hidup 2. Reformasi Sistem Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana
7	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Reformasi Sistem Perlindungan Sosial 2. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah

### III.3. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Bekasi

Tujuan merupakan kondisi yang akan dicapai pada akhir suatu periode pembangunan. Jika dalam RPJMD pencapaian tujuan diukur dalam jangka waktu lima tahun, maka dalam RPD Kota Bekasi Tahun 2024-2026 ini diukur dalam jangka waktu tiga tahun. Sedangkan sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yang dalam Permendagri No. 86 Tahun 2017 didefinisikan sebagai rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah. Pencapaian tujuan dan sasaran dievaluasi dengan menggunakan seperangkat indikator pembangunan yang relevan. Indikator-indikator tersebut ditetapkan dengan maksud agar proses dan pelaksanaan program prioritas dapat berlangsung secara fokus, efektif, dan efisien. Perumusan tujuan dan sasaran beserta indikatornya adalah tahapan strategis yang selanjutnya menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Tujuan dan sasaran pembangunan Kota Bekasi sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah Kota Bekasi Tahun 2024 - 2026 dijelaskan dalam Gambar berikut.





(outcome) beberapa program. Cascading kinerja dari masing-masing indikator tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut.

Tujuan Pembangunan Kota Bekasi yang **Pertama** adalah Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Dinamis, Inovatif dan Akuntabel. Perwujudan tujuan ini ditunjang oleh dua sasaran yaitu (1) Meningkatnya Akuntabilitas dan Profesionalisme Pengelolaan dan Layanan Pemerintah serta (2) Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Kinerja Pemerintah. Masing-masing tujuan dan sasaran memiliki indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan sekaligus acuan ketercapaian. Indikator kinerja masing-masing adalah sebagai berikut.

INDIKATOR KINERJA		
Tujuan 1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Dinamis, Inovatif dan Akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi
Sasaran 1.1	Meningkatnya Akuntabilitas dan Profesionalisme Pengelolaan dan Layanan Pemerintah	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik
Sasaran 1.2	Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Kinerja Pemerintah	Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)
		Nilai Kinerja Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah

		(Opini BPK terhadap Laporan Keuangan)
		Nilai Kinerja Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah (Opini BPK terhadap Laporan Keuangan)

Tujuan Pembangunan Kota Bekasi yang **Kedua** yaitu Terwujudnya Pembangunan Manusia dan Masyarakat yang Berkualitas secara Berkeadilan. Tujuan tersebut didukung pemenuhannya oleh lima sasaran, yaitu (1) Meningkatnya Masyarakat yang Berpengetahuan Tinggi, (2) Meningkatnya Akses dan Kualitas Layanan Kesehatan Masyarakat, (3) Meningkatnya Kesejahteraan Keluarga dan Pembangunan Responsif Gender, dan (4) Meningkatnya Tenaga Kerja yang Adaptif dan Kesejahteraan Masyarakat Kota. Masing-masing tujuan dan sasaran memiliki indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan sekaligus acuan ketercapaian. Indikator kinerja masing-masing adalah sebagai berikut.

INDIKATOR KINERJA		
Tujuan 2	Terwujudnya Pembangunan Manusia dan Masyarakat yang Berkualitas Secara Berkeadilan	Indeks Pembangunan Manusia
Sasaran 2.1	Meningkatnya Masyarakat yang Berpengetahuan Tinggi	
Sasaran 2.2	Meningkatnya Akses dan Kualitas Layanan Kesehatan Masyarakat	
Gini Ratio		

Sasaran 2.3	Meningkatnya Kesejahteraan Keluarga dan Pembangunan Responsif Gender	Indeks Pembangunan Keluarga
		Indeks Pembangunan Gender
Sasaran 2.4	Meningkatnya Tenaga Kerja yang Adaptif dan Kesejahteraan Masyarakat Kota	Tingkat Pengangguran Terbuka
		Angka Kemiskinan

Terwujudnya Ketersediaan Infrastruktur Kota dengan Memperhatikan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan merupakan Tujuan Pembangunan Kota Bekasi yang **Ketiga**. Tujuan ini didukung oleh satu sasaran yaitu Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Infrastruktur dan Layanan Dasar Perkotaan yang Berwawasan Lingkungan. Masing-masing tujuan dan sasaran memiliki indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan sekaligus acuan ketercapaian. Indikator kinerja masing-masing adalah sebagai berikut.

INDIKATOR KINERJA		
Tujuan 3	Terwujudnya Ketersediaan Infrastruktur Kota dengan Memperhatikan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan	Indeks Infrastruktur Wilayah
Sasaran 3.1	Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas Infrastruktur dan Layanan Dasar Perkotaan yang Berwawasan Lingkungan	Indeks Infrastruktur Ke-PU-an
		Indeks Sarana

		Prasarana Perhubungan
		Indeks Perumahan Permukiman
		Pertanahan
		Indeks Penataan Ruang
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Sementara tujuan Pembangunan Kota Bekasi **Keempat** adalah Terwujudnya Kota Bekasi yang Tertib dan Aman. Tujuan tersebut didukung pemenuhannya oleh dua sasaran, yaitu (1) Meningkatnya Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat yang Didukung oleh Kohesi Sosial yang Kuat dan (2) Meningkatnya Upaya dan Kesiapsiagaan Dalam Mengurangi Risiko Bencana. Masing-masing tujuan dan sasaran memiliki indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan sekaligus acuan ketercapaian. Indikator kinerja masing-masing adalah sebagai berikut.

INDIKATOR KINERJA		
Tujuan 4	Terwujudnya Kota Bekasi yang Tertib dan Aman	Persentase Penurunan Jumlah Pelanggaran Keamanan dan Ketertiban Umum
Sasaran 4.1	Meningkatnya Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat yang Didukung oleh Kohesi Sosial yang Kuat	Persentase Penurunan Jumlah Pelanggaran Keamanan dan Ketertiban Umum
		Prosentase

		Kerjasama Antar Kelompok Sara
Indeks Risiko Bencana		
Sasaran 4.2	Meningkatnya Upaya dan Kesiapsiagaan Dalam Mengurangi Risiko Bencana	Indeks Risiko Bencana
		Indeks Penanggulangan Kebakaran

Sedangkan tujuan Pembangunan Kota Bekasi yang **Kelima**, adalah Terwujudnya Ketahanan Struktur Perekonomian Masyarakat Kota. Untuk tujuan yang terakhir ini ditetapkan dua sasaran yang akan mendukung pencapaiannya yaitu (1) Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan, Jasa, dan Industri serta Iklim Usaha Berbasis Pengalaman (Kreatif) dan Investasi dan (2) Meningkatkan Daya Beli Masyarakat. Masing-masing tujuan dan sasaran memiliki indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan sekaligus acuan ketercapaian. Indikator kinerja masing-masing adalah sebagai berikut.

INDIKATOR KINERJA		
Tujuan 5	Terwujudnya Ketahanan Struktur Perekonomian Masyarakat Kota	Laju Pertumbuhan Ekonomi
Sasaran 5.1	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan, Jasa, dan Industri serta Iklim Usaha Berbasis Pengalaman (Kreatif) dan Investasi	Persentase Peningkatan Nilai Sektor Perdagangan dan Jasa
		Persentase Peningkatan Nilai Sektor Industri
		Persentase

		Pertumbuhan Nilai Investasi
Sasaran 5.2	Meningkatnya Daya Beli Masyarakat	Peningkatan Pengeluaran Perkapita
		Laju Inflasi

### **Isu Strategis, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kota Bekasi Tahun 2024**

Arah kebijakan pembangunan disusun untuk memberikan arah dan memastikan tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan selama rentang waktu Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dari 2024 sampai dengan 2026. Pada saat yang sama arah kebijakan juga dirancang untuk menjadi payung bagi pencapaian prioritas pembangunan dalam RPD Kota Bekasi 2024-2026 pada aspek tata kelola pemerintahan, pembangunan manusia, keamanan dan ketertiban kota, pembangunan infrastruktur, dan ketahanan ekonomi. Untuk mendukung pemenuhan tujuan Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Dinamis, Inovatif dan Akuntabel arah kebijakan RPD 2024- 2026 adalah Penguatan fungsi pemerintah melalui reformasi birokrasi dan transformasi layanan berbasis digital.

Dalam rangka mendorong pencapaian tujuan Terwujudnya Pembangunan Manusia dan Masyarakat yang Berkualitas Secara Berkeadilan terdapat dua arah kebijakan pada RPD 2024-2026 yaitu Penguatan kualitas manusia melalui pembangunan pendidikan dan kesehatan yang inklusif dan merata dan Penguatan ketahanan keluarga dan mendorong kewirausahaan secara inklusif.

Sementara untuk mendukung pemenuhan tujuan Terwujudnya Ketersediaan Infrastruktur Kota dengan Memperhatikan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan dan tujuan Terwujudnya Kota Bekasi yang Tertib, arah

kebijakan RPD 2024-2026 adalah Peningkatan ketahanan kota melalui penguatan kualitas pelayanan dasar infrastruktur dan lingkungan.

Sedangkan untuk mendukung pemenuhan tujuan Terwujudnya Ketahanan Struktur Perekonomian Masyarakat Kota arah kebijakan RPD 2024-2026 adalah Peningkatan kekuatan dan kemantapan perekonomian kota melalui kemudahan berusaha di sektor jasa, perdagangan, industri dan usaha kecil alternatif berbasis ekonomi kerakyatan.

Secara lebih detil, strategi dan arah kebijakan pembangunan dalam RPD Kota Bekasi tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/IMPACT /OUTCOME)	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Dinamis, Inovatif dan Akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi		1. Penguatan fungsi pemerintah melalui reformasi birokrasi dan transformasi layanan berbasis digital
1.1	Meningkatnya Akuntabilitas dan Profesionalisme Pengelolaan dan Layanan Pemerintah	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik	1. Meningkatkan kompetensi SDM aparatur pemerintah di bidang layanan masyarakat	
			2. Menerapkan teknologi/transformatasi digital dalam menunjang peningkatan kualitas layanan masyarakat	
1.2	Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Kinerja Pemerintah	Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Nilai Kinerja	1. Meningkatkan akuntabilitas dan kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan berbasis bukti dan data yang saling	



NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/IMPACT /OUTCOME)	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah (Opini BPK terhadap Laporan Keuangan) Presentase Peningkatan PAD	terintegrasi 2. Penguatan, Fasiltasi dan evaluasi pelaksanaan kerja sama antar daerah serta kolaborasi 3. Meningkatkan pengendalian proses pembangunan dan percepatan penyelesaian rekomendasi hasil audit 4. Meningkatkan pemetaan, pengembangan kompetensi, penilaian evaluasi kinerja, kesejahteraan dan promosi aparatur berbasis sistem secara transparan.	
2	Terwujudnya Pembangunan Manusia dan Masyarakat yang Berkualitas Secara Berkeadilan	Indeks Pembangunan Manusia		2. Penguatan kualitas manusia melalui pembangunan pendidikan dan kesehatan yang inklusif dan merata
2.1	Meningkatnya Masyarakat yang Berpengetahuan Tinggi	Indeks Pendidikan	1. Meningkatkan aksesibilitas layanan pendidikan secara merata dan terjangkau seluruh kalangan 2. Meningkatkan kualitas layanan pendidikan bagi seluruh pihak guna peningkatan kualitas SDM siap berkompetisi	
2.2	Meningkatnya Akses dan Kualitas Layanan Kesehatan	Indeks Kesehatan	1. Meningkatkan aksesibilitas layanan kesehatan	

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/IMPACT /OUTCOME)	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	Masyarakat		masyarakat secara merata dan terjangkau seluruh masyarakat	
			2. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui upaya pencegahan dan penyediaan lingkungan sehat	
Gini Ratio				
2.3	Meningkatnya Kesejahteraan Keluarga dan Pembangunan Responsif Gender	Indeks Pembangunan Keluarga	Memfasilitasi pemberdayaan keluarga ber-Wirausaha dengan pendekatan kerjasama antar pihak pengandil	3. Penguatan ketahanan keluarga dan mendorong kewirausahaan secara inklusif
		Indeks Pembangunan Gender	1. Meningkatkan upaya pemberdayaan perempuan dan anak menjadi lebih berkualitas dan berdikari	
			2. Meningkatkan upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak atas hak dasar serta dari kekerasan dan ancaman keselamatan	
2.4	Meningkatnya Tenaga Kerja yang Adaptif dan Kesejahteraan Masyarakat Kota	Tingkat Pengangguran Terbuka	Memperbanyak pelatihan kepada angkatan kerja lokal berbasis kolaborasi	
		Angka Kemiskinan	Menyelaraskan data pelaksanaan penanggulangan kemiskinan dari berbagai sektor serta indikator penyebab	
3	Terwujudnya Ketersediaan Infrastruktur Kota dengan	Indeks Infrastruktur Wilayah		4. Peningkatan ketahanan kota melalui penguatan

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/IMPACT /OUTCOME)	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	Memperhatikan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan			kualitas pelayanan dasar infrastruktur dan lingkungan.
3.1	Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas Infrastruktur dan Layanan Dasar Perkotaan yang Berwawasan Lingkungan	Indeks Infrastruktur Ke-PU-an	1. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas jalan dan fasilitas pelengkap guna pemenuhan aksesibilitas dan mobiltas kendaraan	
			2. Melakukan pengembangan jalur trotoar dan pedestrian sebagai fasilitas pejalan kaki yang layak dan nyaman serta guna aktivitas sosial masyarakat	
			3. Melakukan pengurangan dampak banjir dengan merestorasi sistem drainase dan sungai melalui upaya kerjasama antar daerah dan pemerintah pusat	
		Indeks Sarana Prasarana Perhubungan	1. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas pelayanan angkutan umum, halte, terminal dan fasilitas parkir serta perlengkapan jalan	
			2. Merumuskan dan memberikan rekomendasi kebijakan dalam upaya mendorong pengurangan penggunaan kendaraan pribadi dan beralih kepada	

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/IMPACT /OUTCOME)	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			penggunaan angkutan umum-massal berbasis bus	
		Indeks Perumahan Permukiman Pertanahan	1. Meningkatkan akses dan kapasitas layanan air minum aman secara berkeadilan	
			2. Meningkatkan akses dan kapasitas layanan pengolahan air limbah domestik dan kualitas layanan sanitasi	
			3. Meningkatkan kualitas dan kapasitas permukiman yang layak huni, bebas kumuh melalui peran partisipasi masyarakat dan berkelanjutan	
		Indeks Penataan Ruang	1. Meningkatkan kualitas dan evaluasi penataan serta pemanfaatan ruang dengan memperhatikan aspek lingkungan hijau, keberlanjutan dan ketahanan kota atas resiko bencana dan pencemaran	
			2. Meningkatkan kualitas penataan kota dengan optimalisasi terwujudnya sistem pusat layanan yang berorientasi transit dan ketersediaan ruang publik kota	
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	1. Meningkatkan upaya penurunan dan	

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/IMPACT /OUTCOME)	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			<p>penanggulangan beban pencemaran lingkungan</p> <p>2. Meningkatkan upaya penurunan dampak limbah non domestik dan limbah B3 melalui pendekatan partisipasi dan kolaborasi</p> <p>3. Meningkatkan kapasitas ruang terbuka hijau kota dan optimalisasi penghijauan di kawasan perumahan permukiman guna upaya penurunan temperatur kota</p> <p>4. Menigoptimalkan kapasitas dan kualitas pelayanan persampahan dengan mendorong kerjasama antar daerah, pihak swasta dan masyarakat</p>	
4	Terwujudnya Kota Bekasi yang Tertib dan Aman	Persentase Penurunan Jumlah Pelanggaran Keamanan dan Ketertiban Umum		
4.1	Meningkatnya Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat yang Didukung oleh Kohesi Sosial yang Kuat	Persentase Penurunan Jumlah Pelanggaran Keamanan dan Ketertiban Umum	<p>1. Meningkatkan kapasitas pengetahuan masyarakat dalam hal upaya menjaga ketentraman dan ketertiban umum</p> <p>2. Mengoptimalkan upaya pencegahan dan penanganan tindak pelanggaran</p>	

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/IMPACT /OUTCOME)	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			keamanan dan ketertiban melalui deteksi dini dan pengawasan berbasis digital	
		Prosentase Kerjasama Antar Kelompok Sara	Memfasilitasi ruang kerjasama dan komunikasi antar kelompok	
Indeks Risiko Bencana				
4.2	Meningkatnya Upaya dan Kesiapsiagaan Dalam Mengurangi Risiko Bencana	Indeks Risiko Bencana	Meningkatkan kapasitas dan kualitas sarana prasarana serta kesiapsiagaan SDM penanggulangan bencana	
		Indeks Penanggulangan Kebakaran	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan bencana	
5	Terwujudnya Ketahanan Struktur Perekonomian Masyarakat Kota	Laju Pertumbuhan Ekonomi		5. Peningkatan kekuatan dan kemantapan perekonomian kotamelalui kemudahanberusaha di sektorjasa, perdagangan industri dan usaha kecil alternative berbasis ekonomi kerakyatan
5.1	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan, Jasa, dan Industri serta Iklim Usaha Berbasis Pengalaman (Kreatif) dan Investasi	Persentase Peningkatan Nilai Sektor Perdagangan dan Jasa	1. Memberikan permodalan melalui dana bergulir atau pelatihan bagi koperasi dan UKM dengan mendorong peran organisasi non pemerintah 2. Membuka ruang, fasilitas, dan kekmudahan pemasaran berbasis kolaborasi 3. Meningkatkan sektor kepariwisataan perkotaan serta pelestarian kesenian lokal dan situs bersejarah	
		Persentase Peningkatan Nilai	Memfasilitasi sertifikasi bagi Industri Kecil dan	

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/IMPACT /OUTCOME)	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		Sektor Industri	Menengah	
		Persentase Pertumbuhan Nilai Investasi	Mengembangkan promosi penanaman modal	
5.2	Meningkatnya Daya Beli Masyarakat	Peningkatan Pengeluaran Perkapita	Memberdayakan masyarakat melalui pengembanan sektorsektor alternatif	
		Laju Inflasi	Menjaga stabilitas harga komoditas melalui intervensi di sektor distribusi dan upaya kemandirian pangan masyarakat	

Sumber : Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bekasi Tahun 2024-2026.

#### III.4. Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat DPRD Kota Bekasi

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) Tahun. Tujuan merupakan target organisasi, sehingga pencapaiannya dapat diukur berdasarkan faktor-faktor kunci keberhasilan organisasi. Tujuan sifatnya lebih konkrit dari pada misi dan mengarah ke suatu titik terang pencapaian hasil.

Sesuai dengan tugas pokok Sekretariat DPRD dalam unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD Kota Bekasi, Sekretariat DPRD mendukung pencapaian RPD Kota Bekasi Tahun 2024 – 2026, yaitu Tujuan yang pertama "Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Dinamis, Inovatif dan Akuntabel" dan Sasaran dari Tujuan tersebut yaitu "Meningkatnya Akuntabilitas dan Profesionalisme Pengelolaan dan Layanan Pemerintah".

Tujuan dari Sekretariat DPRD Kota Bekasi yaitu "Meningkatkan pengelolaan administrasi dan fasilitasi kegiatan DPRD secara efektif, efisien transparan dan akuntabel dalam menunjang harmonisasi kemitraan antara eksekutif dan legislatif".

Indikator Tujuan:

Indeks Kepuasan DPRD Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD Indikator Sasaran:

1. Indeks Kepuasan DPRD Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD;
2. Prosentase Raperda yang disahkan menjadi Perda tepat waktu;
3. Indeks Kepuasan Masyarakat.

Sedangkan sasaran dari Sekretariat DPRD Kota Bekasi yaitu 1. Meningkatnya Kualitas Layanan Sekretariat DPRD Terhadap Tugas dan Fungsi DPRD, 2. Meningkatnya Harmonisasi Kemitraan antara Eksekutif dan Legislatif, dan 3. Meningkatnya Profesionalisme Sekretariat DPRD.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yang diperoleh secara terukur dan nyata akan dicapai dalam setiap tahun. Sasaran merupakan bagian internal dari perencanaan strategis SKPD bersifat spesifik, dapat diukur ketercapaiannya dengan berorientasi pada hasil untuk akhir tahun, berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan oleh Sekretariat DPRD maka Sasaran yang ingin dicapai.

Tujuan dan sasaran jangka menengah Sekretariat DPRD seperti tergambar pada tabel 4.1.



**TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD 2024-2026**

NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE		
					1	2	3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatkan Fasilitasi Kegiatan DPRD dalam pelaksanaan fungsi Legislasi, Penganggaran dan Pengawasan	Prosentase Fasilitasi Pelaksanaan Kegiatan DPRD	Meningkatnya Kualitas Layanan dan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD	Prosentase Raperda yang disahkan menjadi Perda tepat waktu	<b>75,3</b>	<b>75,4</b>	<b>75,5</b>
				Prosentase Pengesahan Anggaran tepat waktu	<b>75,3</b>	<b>75,4</b>	<b>75,5</b>
				Penyampaian Rekomendasi LKPJ tepat waktu	<b>Tepat Waktu</b>	<b>Tepat Waktu</b>	<b>Tepat Waktu</b>
				Nilai AKIP Perangkat Daerah	<b>70,5</b>	<b>70,6</b>	<b>70,7</b>

Sumber data: Bagian Program dan Keuangan Sekretariat DPRD 2023

**INDIKATOR KINERJA UTAMA**  
**SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2024-2026**

OPD : Sekretariat DPRD

Tujuan RPD : Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional, Dinamis, Inovatif Dan Akuntabel

Sasaran RPD : Meningkatkan Kualitas Manajemen dan Kinerja Pemerintah

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULASI	IKU	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-		
							2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatkan Fasilitasi Kegiatan DPRD dalam pelaksanaan fungsi Legislasi, Penganggaran dan Pengawasan	Prosentase Fasilitasi Pelaksanaan Kegiatan DPRD	Meningkatnya Kualitas Layanan dan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD	Prosentase Raperda yang disahkan menjadi Perda tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Perda yang disahkan}}{\text{Raperda yang diusulkan}} \times 100\%$	Persen (%)	75,3	75,4	75,5
				Prosentase Pengesahan Anggaran tepat waktu	$\frac{\text{Perda dan Perkada APBD/ LP2APBD yang disahkan}}{\text{Perda dan Perkada APBD yang disahkan tepat waktu}} \times 100\%$	Persen (%)	75,3	75,4	75,5
				Penyampaian Rekomendasi LKPJ tepat waktu	Waktu penyampaian Rekomendasi LKPJ	Tepat Waktu/ Tidak Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu

**BAB IV****RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DPRD KOTA BEKASI****IV.1. Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD Kota Bekasi**

Sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kota Bekasi yaitu dalam penyusunan perencanaan pembangunan, harus memastikan Rencana Pembangunan daerah Kota Bekasi periode Tahun 2024-2026 tertuang dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJMD dan RKPD).

Selanjutnya untuk memastikan perencanaan pembangunan daerah Kota Bekasi (RPJMD dan RKPD) dijabarkan dalam perencanaan Perangkat Daerah (Renstra dan Renja).

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan SKPD guna mencapai sasaran tertentu.

Dengan demikian, pada tahun 2024 Sekretariat DPRD Kota Bekasi akan melaksanakan 2 (dua) program, yang terdiri dari 1 (satu) program Administrasi Umum Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota dan Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD yang terdiri dari 16 (enam belas) kegiatan dan 58 (lima puluh delapan) Sub Kegiatan.

Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Program dan Kegiatan yang ada pada Sekretariat DPRD Kota Bekasi yang tertuang dalam Renstra Tahun 2024-2026, yaitu:

**I. Program Administrasi Umum Sekretariat DPRD Kabupaten/ Kota**

1. Indikator Program : Optimalisasi Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Sekretariat DPRD.

**a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah****1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**

Indikator	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
Kinerja	: Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
Satuan	: Dokumen.

**2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD**

Indikator	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja.
Kinerja	: Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian.
Satuan	: Laporan.

**b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

**1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**

Indikator	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN.
Kinerja	: Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN.
Satuan	: Laporan.

**2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD**

Indikator	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
Kinerja	: Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.

Satuan : Laporan.

**3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD**

Indikator : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan.

Kinerja : Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan.

Satuan : Laporan.

2. Indikator Program : Optimalisasi Disiplin Aparatur Sekretariat DPRD.

**c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**

**1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya**

Indikator : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan.

Kinerja : Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan.

Satuan : Paket.

3. Indikator Program : Optimalisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD.

**c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**

**2) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi**

Indikator : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan.

Kinerja : Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.

Satuan : Orang.

**3) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan**

Indikator : Jumlah Orang yang Mengikuti

	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan.
Kinerja	: Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan.
Satuan	: Orang.

4. Indikator Program : Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran Sekretariat DPRD.

**d. Administrasi Umum Perangkat Daerah**

**1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor**

Indikator	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan.
Kinerja	: Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
Satuan	: Paket.

**2) Penyediaan Bahan Logistik Kantor**

Indikator	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan.
Kinerja	: Tersedianya Bahan Logistik Kantor.
Satuan	: Paket.

**3) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan**

Indikator	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan.
Kinerja	: Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan.
Satuan	: Paket.

**4) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan**

Indikator	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan.
-----------	---------------------------------------------------------------------------------

Kinerja : Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.

Satuan : Dokumen.

#### **5) Fasilitas Kunjungan Tamu**

Indikator : Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu.

Kinerja : Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu.

Satuan : Laporan.

#### **6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**

Indikator : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

Kinerja : Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

Satuan : Laporan.

5. Indikator Program : Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Sekretariat DPRD.

#### **e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

##### **Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya**

Indikator : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan.

Kinerja : Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya.

Satuan : Unit.

6. Indikator Program : Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran Sekretariat DPRD.

#### **f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

##### **1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat**

Indikator : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat.

Kinerja : Terlaksananya Penyediaan Jasa

Surat Menyurat.

Satuan : Laporan.

**2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik**

Indikator : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan.

Kinerja : Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.

Satuan : Laporan.

**3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**

Indikator : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan.

Kinerja : Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor.

Satuan : Laporan.

7. Indikator Program : Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Sekretariat DPRD.

**g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

**1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas/ Kendaraan Dinas Jabatan**

Indikator : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya.

Kinerja : Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.

Satuan : Unit.

**2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan**

Indikator : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya.



Kinerja : Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.

Satuan : Unit.

### 3) Pemeliharaan Mebel

Indikator : Jumlah Mebel yang Dipelihara.

Kinerja : Terlaksananya Pemeliharaan Mebel.

Satuan : Unit.

### 4) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Indikator : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara.

Kinerja : Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

Satuan : Unit.

### 5) Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Indikator : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi.

Kinerja : Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

Satuan : Unit.

8. Indikator Program : Optimalisasi Kegiatan dan Layanan Administrasi Keuangan Sekretariat DPRD.

#### h. Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD

##### 1) Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD

Indikator : Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD.

Kinerja : Tersedianya Hak Keuangan Anggota DPRD.

Satuan : Orang/bulan.

##### 2) Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD

Indikator : Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan.

Kinerja : Terlaksananya Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD.  
Satuan : Paket.

### 3) Pelaksanaan Medical Check Up DPRD

Indikator : Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD.  
Kinerja : Terlaksananya Medical Check Up DPRD.  
Satuan : Orang.

#### i. Layanan Administrasi DPRD

##### Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD

Indikator : Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD.  
Kinerja : Terlaksananya Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD.  
Satuan : Laporan.

## II. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

1. Indikator Program : Persentase Terfasilitasinya Proses Penyusunan dan Penetapan PERDA.

#### a. Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD

##### 1) Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah

Indikator : Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah.  
Kinerja : Terlaksananya Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah.  
Satuan : Dokumen.

##### 2) Pembahasan Rancangan Perda

Indikator : Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan

Kinerja : Peraturan Daerah.  
: Terlaksananya Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah.  
Satuan : Dokumen.

### 3) Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan

Indikator : Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan.  
Kinerja : Terlaksananya Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan.  
Satuan : Dokumen.

### 4) Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik

Indikator : Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi.  
Kinerja : Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik.  
Satuan : Dokumen.

### 5) Penyusunan Tata Tertib DPRD

Indikator : Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun.  
Kinerja : Tersusunnya Tata Tertib DPRD.  
Satuan : Dokumen.

2. Indikator Program : Persentase Terpenuhinya Proses Penyusunan dan Penetapan APBD dan LAPBD.

#### b. Pembahasan Kebijakan Anggaran

##### 1) Pembahasan KUA dan PPAS

Indikator : Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS.  
Kinerja : Terlaksananya Pembahasan KUA dan PPAS.

Satuan : Dokumen.

## **2) Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS**

Indikator : Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS.

Kinerja : Terlaksananya Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS.

Satuan : Dokumen.

## **3) Pembahasan APBD**

Indikator : Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD.

Kinerja : Terlaksananya Pembahasan APBD.

Satuan : Dokumen.

## **4) Pembahasan APBD Perubahan**

Indikator : Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan.

Kinerja : Terlaksananya Pembahasan APBD Perubahan.

Satuan : Dokumen.

## **5) Pembahasan Laporan Semester**

Indikator : Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester.

Kinerja : Terlaksananya Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester.

Satuan : Dokumen.

## **6) Pembahasan Pertanggungjawaban APBD**

Indikator : Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD.

Kinerja : Terlaksananya Pembahasan Pertanggungjawaban APBD.

Satuan : Dokumen.

3. Indikator Program : Persentase Terfasilitasinya Kegiatan DPRD.

**c. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan**

**1) Pengawasan urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum**

Indikator : Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum.

Kinerja : Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum.

Satuan : Laporan.

**2) Pengawasan urusan Pemerintahan bidang Kesejahteraan Rakyat**

Indikator : Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat.

Kinerja : Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat.

Satuan : Laporan.

**3) Pengawasan urusan Pemerintahan bidang Perekonomian**

Indikator : Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian.

Kinerja : Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian.

Satuan : Laporan.

**4) Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan**

Indikator : Jumlah Dokumen Hasil

Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Kinerja : Terlaksananya Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Satuan : Dokumen.

#### **5) Pengawasan Penggunaan Anggaran**

Indikator : Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran.

Kinerja : Terlaksananya Pengawasan Penggunaan Anggaran.

Satuan : Dokumen.

#### **6) Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah**

Indikator : Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah.

Kinerja : Terlaksananya Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah.

Satuan : Dokumen.

#### **d. Peningkatan Kapasitas DPRD**

##### **1) Pendalaman Tugas DPRD**

Indikator : Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD.

Kinerja : Terlaksananya Pendalaman Tugas DPRD.

Satuan : Dokumen.

##### **2) Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli**

Indikator : Jumlah Orang dalam Kelompok

Pakar dan Tim Ahli.  
 Kinerja : Tersedianya Kelompok Pakar dan Tim Ahli.

Satuan : Orang.

### 3) Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi

Indikator : Jumlah Tenaga Ahli Fraksi.

Kinerja : Tersedianya Tenaga Ahli Fraksi.

Satuan : Orang.

### 4) Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat

Indikator : Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat.

Kinerja : Terselenggaranya Hubungan Masyarakat.

Satuan : Dokumen.

### 5) Penyusunan Program Kerja DPRD

Indikator : Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD.

Kinerja : Tersusunnya Rencana Kerja DPRD.

Satuan : Dokumen.

## e. Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat

### 1) Kunjungan Kerja dalam Daerah

Indikator : Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD.

Kinerja : Terselenggaranya Kunjungan Kerja DPRD.

Satuan : Laporan.

### 2) Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Indikator : Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun.

Kinerja : Tersusunnya Pokok-Pokok Pikiran DPRD.

Satuan : Dokumen.

### 3) Pelaksanaan Reses

Indikator	: Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses.
Kinerja	: Terlaksananya Reses.
Satuan	: Dokumen.

#### **f. Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD**

##### **1) Pengawasan Kode Etik DPRD**

Indikator	: Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD.
Kinerja	: Terlaksananya Pengawasan Kode Etik DPRD.
Satuan	: Laporan.

4. Indikator Program : Persentase Terfasilitasinya Kegiatan DPRD.

#### **g. Fasilitas Tugas DPRD**

##### **1) Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD**

Indikator	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD.
Kinerja	: Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD.
Satuan	: Dokumen.

##### **2) Penyusunan Laporan Kinerja DPRD**

Indikator	: Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun.
Kinerja	: Tersusunnya Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD.
Satuan	: Laporan.

##### **3) Fasilitas Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah**

Indikator	: Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah.
Kinerja	: Terlaksananya Fasilitas Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah.



Musyawarah.

Satuan : Dokumen.

#### **4) Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD**

Indikator : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi  
Tugas Pimpinan DPRD.

Kinerja : Terlaksananya Fasilitasi Tugas  
Pimpinan DPRD.

Satuan : Dokumen.

**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DPRD KOTA BEKASI  
TAHUN 2024-2026  
BERDASARKAN KEPMENDAGRI NOMOR 050-5889 TAHUN 2021**

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
									201.444.734.098,00					##### ####
4									201.444.734.098,00					##### ####
4	02								201.444.734.098,00					##### ####
4	02	01					1		91.480.739.138,00					97.650.107.683,00
4	02	01	2.01				1		245.815.000,00					255.815.000,00
4	02	01	2.01	01			1		40.000.000,00					45.000.000,00

									Optimalisasi Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen dan Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Kota Bekasi, Bekasi Timur, Margahayu	100 %	25 Dokumen	100 %		PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	25 Dokumen			
4	0	0	2.0	0			2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								205.815.000,00						210.815.000,00	
									Optimalisasi Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan Sekretariat DPRD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Dokumen dan Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Kota Bekasi, Bekasi Timur, Margahayu	100 %	3 Laporan	100 %		PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan			
4	0	0	2.0					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								10.735.352.000,00							11.366.902.870,00

4	0	0	2.0	0		3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							10.498.262.000,00				11.129.812.870,00
							Optimalisasi Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan Sekretariat DPRD	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	- Kota Bekasi, Bekasi Timur, Margahayu	100 %	55 Orang/bulan	100 %		PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	55 Orang/bulan	
4	0	0	2.0	0		4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD							237.090.000,00				237.090.000,00
							Optimalisasi Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan Sekretariat DPRD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	- Kota Bekasi, Bekasi Timur, Margahayu	100 %	2 Laporan	100 %		PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	
4	0	0	2.0			2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							620.000.000,00				682.000.000,00
4	0	0	2.0	0		5	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi							100.000.000,00				110.000.000,00

									Optimalisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	- Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	14 Orang	100 %		PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	14 Orang					
4	0	0	2.0	1			6	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan								520.000.000,00							572.000.000,00		
									Optimalisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	- Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	53 Orang	100 %		PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	53 Orang					
4	0	0	2.0					Administrasi Umum Perangkat Daerah								5.502.329.562,00								6.194.207.200,00	
4	0	0	2.0	0			7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								75.000.000,00									80.000.000,00

									Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran Sekretariat DPRD	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Tersedianya kegiatan pada Administrasi Umum Perangkat Daerah	- Kota Bekasi, Bekasi Timur, Margaha yu	100 %	1 Paket	100 %		PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket				
4	0	0	2.0	0			8	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								2.637.763.000,00							2.789.916.000,00	
									Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran Sekretariat DPRD	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Tersedianya kegiatan pada Administrasi Umum Perangkat Daerah	- Kota Bekasi, Bekasi Timur, Margaha yu	100 %	4 Paket	100 %		PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket				
4	0	0	2.0	0			9	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan								429.116.562,00								511.218.700,00
									Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran Sekretariat DPRD	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Tersedianya kegiatan pada Administrasi Umum Perangkat Daerah	- Kota Bekasi, Bekasi Timur, Margaha yu	100 %	3 Paket	100 %		PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket				
4	0	0	2.0	0			1	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan								580.000.000,00								875.000.000,00

									Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Tersedianya kegiatan pada Administrasi Umum Perangkat Daerah	- Kota Bekasi, Bekasi Timur, Margaha yu	100 %	65600 Dokumen	100 %		PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	65600 Dokumen			
4	0	0	2.0	0			1		Fasilitasi Kunjungan Tamu							1.152.450.000,00						1.210.072.500,00	
									Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran Sekretariat DPRD	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya kegiatan pada Administrasi Umum Perangkat Daerah	- Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	28.99 Laporan	100 %		PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	28.99 Laporan			
4	0	0	2.0	0			1		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							628.000.000,00							728.000.000,00
									Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran Sekretariat DPRD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya kegiatan pada Administrasi Umum Perangkat Daerah	- Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	34.025 Laporan	100 %		PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	34.025 Laporan			
4	0	0	2.0				3		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							1.300.000.000,0							3.500.000.000,00





								Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran Sekretariat DPRD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	- Kota Bekasi, Bekasi Timur, Margaha yu	100 %	36 Laporan	100 %		PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan			
4	0	0	2.0	0			1	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								5.690.976.012,00						6.260.073.613,00
								Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran Sekretariat DPRD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	- Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	12 Laporan	100 %		PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan			
4	0	0	2.0				5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								7.628.316.564,00						7.950.000.000,00
4	0	0	2.0	0			1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								300.000.000,00						300.000.000,00

									Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Sekretariat DPRD	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Tersedianya kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah	- Kota Bekasi, Bekasi Timur, Margaha yu	100 %	4 Unit	100 %		PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 Unit			
4	0	0	2.0	0			1	8	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							550.000.000,00						600.000.000,00	
									Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Sekretariat DPRD	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Tersedianya kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah	- Kota Bekasi, Bekasi Timur, Margaha yu	100 %	37 Unit	100 %		PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	37 Unit			
4	0	0	2.0	0			1	9	Pemeliharaan Mebel							100.000.000,00							150.000.000,00

								Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Sekretariat DPRD	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Tersedianya kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah	- Kota Bekasi, Bekasi Timur, Margahayu	100 %	100 Unit	100 %		PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Mebel yang Dipelihara	100 Unit		
4	0	0	2.0	0		2		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							300.000.000,00						400.000.000,00
								Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Sekretariat DPRD	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Tersedianya kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah	- Kota Bekasi, Bekasi Timur, Margahayu	100 %	211 Unit	100 %		PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	211 Unit		
4	0	0	2.0	0		2		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							6.378.316.564,00						6.500.000.000,00



								Optimalisasi Kegiatan dan Layanan Administrasi Keuangan Sekretariat DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	Tersedianya Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	150 Paket	100 %		PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	150 Paket					
4	0	0	2.1	0		2		Pelaksanaan Medical Check Up DPRD								150.000.000,00						165.000.000,00		
								Optimalisasi Kegiatan dan Layanan Administrasi Keuangan Sekretariat DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	Tersedianya Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	- Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	50 Orang	100 %		PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	50 Orang					
4	0	0	2.1			7		Layanan Administrasi DPRD								750.000.000,00							1.000.000.000,00	
4	0	0	2.1	0		2		Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD								750.000.000,00								1.000.000.000,00

									Optimalisasi Kegiatan dan Layanan Administrasi Keuangan Sekretariat DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Tersedianya Layanan Administrasi DPRD	- Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	40 Laporan	100 %		PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	40 Laporan						
4	0	0			2				PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD								109.963.994.960,00						##### ####			
4	0	0	2.0			8			Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD								19.200.000.000,00								24.450.000.000,00	
4	0	0	2.0	0		2			Penyusunan dan Pembahasan Program								1.000.000.000,00								1.200.000.000,00	
									Pembentukan Peraturan Daerah																	
									Persentase Terasilitasi Kegiatan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Tersedianya Dokumen Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	- Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	2 Dokumen	100 %		PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	2 Dokumen						
4	0	0	2.0	0		2			Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah								8.750.000.000,00								10.000.000.000,00	

									Persentase Terfasilitasi Kegiatan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Tersedianya Dokumen Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	- Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	17 Dokumen	100 %		PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	17 Dokumen			
4	0	0	2.0	0			2		Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan							3.250.000.000,00						5.000.000.000,00	
									Persentase Terfasilitasi Kegiatan DPRD	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	Tersedianya Dokumen Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	- Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	10 Dokumen	100 %		PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	10 Dokumen			
4	0	0	2.0	0			2		Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik							5.750.000.000,00						7.500.000.000,00	
									Persentase Terfasilitasi Kegiatan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	Tersedianya Dokumen Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	- Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	10 Dokumen	100 %		PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	10 Dokumen			
4	0	0	2.0	0			3		Penyusunan Tata Tertib DPRD							450.000.000,00							750.000.000,00

								Persentase Terfasilitasi ya Kegiatan DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	Tersedianya Dokumen Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	- Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Dokumen	100 %		PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	1 Dokumen		
4	0	0	2.0			9		Pembahasan Kebijakan Anggaran							6.300.000.000,00					6.600.000.000,00
4	0	0	2.0	0		3		Pembahasan KUA dan PPAS							1.050.000.000,00					1.100.000.000,00
								Persentase Terpenuhinya Proses Penyusunan dan Penetapan APBD dan LAPBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	Tersedianya Dokumen Pembahasan Kebijakan Anggaran	- Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Dokumen	100 %		PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1 Dokumen		
4	0	0	2.0	0		3		Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS							1.050.000.000,00					1.100.000.000,00



								Persentase Terpenuhi a Proses Penyusunan dan Penetapan APBD dan LAPBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Tersedianya Dokumen Pembahasan Kebijakan Anggaran	- Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Dokumen	100 %		PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1 Dokumen					
4	0	0	2.0	0			3	Pembahasan APBD										1.050.000.000,00					1.100.000.000,00
								Persentase Terpenuhi a Proses Penyusunan dan Penetapan APBD dan LAPBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	Tersedianya Dokumen Pembahasan Kebijakan Anggaran	- Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Dokumen	100 %		PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1 Dokumen					
4	0	0	2.0	0			3	Pembahasan APBD Perubahan										1.050.000.000,00					1.100.000.000,00

								Persentase Terpenuhi a Proses Penyusunan dan Penetapan APBD dan LAPBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	Tersedianya Dokumen Pembahasan Kebijakan Anggaran	- Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Dokumen	100 %		PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	1 Dokumen				
4	0	0	2.0	0			3	Pembahasan Laporan Semester										1.050.000.000,00					1.100.000.000,00
	2	2	2	5			5	Persentase Terpenuhi a Proses Penyusunan dan Penetapan APBD dan LAPBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	Tersedianya Dokumen Pembahasan Kebijakan Anggaran	- Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	1 Dokumen	100 %		PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	1 Dokumen				
4	0	0	2.0	0			3	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD										1.050.000.000,00					1.100.000.000,00
	2	2	2	6			6																

								Persentase Terpenuhi a Proses Penyusunan dan Penetapan APBD dan LAPBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Tersedianya Dokumen Pembahasan Kebijakan Anggaran	- Semua Kota/Kab , Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	100 %	1 Dokumen	100 %		PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1 Dokumen		
4	0	0	2.0			1		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan							26.864.096.960,00						28.351.322.408,00
4	0	0	2.0	0		3		Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum							4.689.127.240,00						4.923.583.602,00
								Persentase Terfasilitasi ya Kegiatan DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Tersedianya Dokumen dan Laporan Pengawasan Penyelenggaran Pemerintahan	- Semua Kota/Kab , Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	100 %	12 Laporan	100 %		PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	12 Laporan		
4	0	0	2.0	0		3		Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur							4.689.127.240,00						4.923.583.602,00

									Persentase Terasilitasi ya Kegiatan DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Tersedianya Dokumen dan Laporan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	- Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	12 Laporan	100 %		PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	12 Laporan	
4	0	0	2.0	0			3			Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat						4.689.127.240,00					4.923.583.602,00
									Persentase Terasilitasi ya Kegiatan DPRD	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Tersedianya Dokumen dan Laporan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	- Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	12 Laporan	100 %		PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	12 Laporan	
4	0	0	2.0	0			4			Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian						4.689.127.240,00					4.923.583.602,00
									Persentase Terasilitasi ya Kegiatan DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Tersedianya Dokumen dan Laporan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	- Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	12 Laporan	100 %		PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	12 Laporan	
4	0	0	2.0	0			4			Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan						1.500.600.000,00					1.700.000.000,00



4	0	0	2.0			1		Peningkatan Kapasitas DPRD							22.860.900.000,00				21.830.023.200,00
4	0	0	2.0	0		4	4	Pendalaman Tugas DPRD							8.200.000.000,00				6.820.000.000,00
								Persentase Terfasilitasi ya Kegiatan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	Tersedianya Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD	- Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	14 Dokumen	100 %		PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	14 Dokumen	
4	0	0	2.0	0		4	5	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli							2.521.612.000,00				2.575.773.200,00
								Persentase Terfasilitasi ya Kegiatan DPRD	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Tersedianya Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD	- Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	204 Orang	100 %		PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	204 Orang	
4	0	0	2.0	0		4	6	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi							576.000.000,00				770.000.000,00
								Persentase Terfasilitasi ya Kegiatan DPRD	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	Tersedianya Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD	- Kota Bekasi, Bekasi Timur, Margaha yu	100 %	54 Orang	100 %		PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	54 Orang	
4	0	0	2.0	0		4	7	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat							9.978.288.000,00				10.000.000.000,00

								Persentase Terfasilitasi ya Kegiatan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Tersedianya Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD	- Kota Bekasi, Bekasi Timur, Margaha yu	100 %	52 Dokumen	100 %		PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	52 Dokumen		
4	0	0	2.0	0		4		Penyusunan Program Kerja DPRD							1.585.000.000,00					1.664.250.000,00
								Persentase Terfasilitasi ya Kegiatan DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	Tersedianya Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD	- Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	3 Dokumen	100 %		PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	3 Dokumen		
4	0	0	2.0			1		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat							12.447.800.000,00					12.447.800.000,00
4	0	0	2.0	0		4		Kunjungan Kerja dalam Daerah							405.975.000,00					405.975.000,00
								Persentase Terfasilitasi ya Kegiatan DPRD	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	Tersedianya Dokumen dan Laporan hasil Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	- Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	3 Laporan	100 %		PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	3 Laporan		
4	0	0	2.0	0		5		Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD							1.225.000.000,00					1.225.000.000,00

								Persentase Terfasilitasi ya Kegiatan DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	Tersedianya Dokumen dan Laporan hasil Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	- Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	3 Dokumen	100 %		PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	3 Dokumen			
4	0	0	2.0	0		5														10.816.825.000,00	
								Persentase Terfasilitasi ya Kegiatan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	Tersedianya Dokumen dan Laporan hasil Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	- Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	3 Dokumen	100 %		PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3 Dokumen			
4	0	0	2.0			1														3.089.068.000,00	
4	0	0	2.0	0		5														3.089.068.000,00	
								Persentase Terfasilitasi ya Kegiatan DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	Tersedianya Laporan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	- Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	12 Laporan	100 %		PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	12 Laporan			
4	0	0	2.0			1														20.554.761.000,00	
4	0	0	2.0	0		5														8.657.820.000,00	



									Persentase Terfasilitasi ya Kegiatan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Tersedianya Dokumen dan Laporan hasil Fasilitasi Tugas DPRD	- Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	13 Dokumen	100 %		PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	13 Dokumen			
4	0	0	2.0	0			5		Penyusunan Laporan Kinerja DPRD							500.000.000,00							525.000.000,00
									Persentase Terfasilitasi ya Kegiatan DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	Tersedianya Dokumen dan Laporan hasil Fasilitasi Tugas DPRD	- Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	2 Laporan	100 %		PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	2 Laporan			
4	0	0	2.0	0			5		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah							9.156.310.000,00							10.071.941.000,00
									Persentase Terfasilitasi ya Kegiatan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Tersedianya Dokumen dan Laporan hasil Fasilitasi Tugas DPRD	- Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	3 Dokumen	100 %		PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	3 Dokumen			
4	0	0	2.0	0			5		Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD							1.300.000.000,00							1.300.000.000,00



														201.444.734.098	1	
4	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							0		91.480.739.138	9	
4	02	01	2.01		Perencanaan, Pengggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							0		245.815.000	8	
4	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	- Kota Bekasi, Bekasi Timur, Margahayu	-	25 Dokumen	-	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	40.000.000	4

4	02	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	- Kota Bekasi, Bekasi Timur, Margahayu	-	3 Laporan	-	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	205.815.000	4
4	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								0		10.735.352.000	1
4	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	-	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-	- Kota Bekasi, Bekasi Timur, Margahayu	-	55 Orang/bulan	-	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	10.498.262.000	1

4	02	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	- Kota Bekasi, Bekasi Timur, Margahayu	-	2 Laporan	-	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	237.090.000	4
4	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								0		620.000.000	6
4	02	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	-	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	14 Orang	-	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	100.000.000	1
4	02	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua	-	53 Orang	-	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	520.000.000	5

									Kel/Desa								
4	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								0			5.502.329.562	5
4	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	- Kota Bekasi, Bekasi Timur, Margahayu	-	1 Paket	-	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	75.000.000		7
4	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-	- Kota Bekasi, Bekasi Timur, Margahayu	-	4 Paket	-	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.637.763.000		2

4	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	- Kota Bekasi, Bekasi Timur, Margahayu	-	3 Paket	-	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	429.116.562	4
4	02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	-	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-	- Kota Bekasi, Bekasi Timur, Margahayu	-	65600 Dokumen	-	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	580.000.000	5
4	02	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	- Kota Bekasi, Bekasi Timur, Margahayu	-	12 Laporan	-	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.152.450.000	1
4	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	- Kota Bekasi, Bekasi Timur, Margahayu	-	12 Laporan	-	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	628.000.000	6

4	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							0		1.300.000.000	1
4	02	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	- Kota Bekasi, Bekasi Timur, Margahayu	-	442 Unit	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.300.000.000	1
4	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							0		6.690.976.012	6
4	02	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	566 Laporan	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	50.000.000	2



4	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	- Kota Bekasi, Bekasi Timur, Margahayu	-	36 Laporan	-	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	950.000.000	9
4	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	- Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	12 Laporan	-	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5.690.976.012	5
4	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								0		7.628.316.564	7

4	02	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-	- Kota Bekasi, Bekasi Timur, Margahayu	-	1 Unit	-	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	300.000.000	1
4	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	- Kota Bekasi, Bekasi Timur, Margahayu	-	33 Unit	-	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	550.000.000	4
4	02	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	-	Jumlah Mebel yang Dipelihara	-	- Kota Bekasi, Bekasi Timur, Margahayu	-	100 Unit	-	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	100.000.000	1

4	02	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	- Kota Bekasi, Bekasi Timur, Margahayu	-	396 Unit	-	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	300.000.000	3
4	02	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	- Kota Bekasi, Bekasi Timur, Margahayu	-	4 Unit	-	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.378.316.564	6
4	02	01	2.15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD								0		58.007.950.000	5
4	02	01	2.15	01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	-	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	-	- Kota Bekasi, Bekasi Timur, Margahayu	-	50 Orang/Bulan	-		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	57.157.950.000	5
4	02	01	2.15	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	-	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	-	- Kota Bekasi, Bekasi	-	150 Paket	-		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	700.000.000	7

									Timur, Margahayu							
4	02	01	2.15	03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	-	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	-	- Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	50 Orang	-		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	150.000.000	1
4	02	01	2.16		Layanan Administrasi DPRD							0			750.000.000	7
4	02	01	2.16	03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	-	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	-	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	40 Laporan	-	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	750.000.000	7
4	02	02			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD							0			109.963.994.960	8

4	02	02	2.01		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD							0		19.200.000.000	1	
4	02	02	2.01	01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	-	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	2 Dokumen	-	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.000.000.000	7
4	02	02	2.01	02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	-	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	-	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	17 Dokumen	-	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.750.000.000	6
4	02	02	2.01	03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	-	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	-	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua	-	10 Dokumen	-	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.250.000.000	2

									Kel/Desa							
4	02	02	2.01	04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	-	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	-	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	10 Dokumen	-	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5.750.000.000	4
4	02	02	2.01	05	Penyusunan Tata Tertib DPRD	-	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	-	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Dokumen	-	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	450.000.000	3
4	02	02	2.02		Pembahasan Kebijakan Anggaran								0		6.300.000.000	4

4	02	02	2.02	01	Pembahasan KUA dan PPAS	-	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	-	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Dokumen	-	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.050.000.000	7
4	02	02	2.02	02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	-	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	-	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Dokumen	-	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.050.000.000	7

4	02	02	2.02	03	Pembahasan APBD	-	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	-	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Dokumen	-	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.050.000.000	7
4	02	02	2.02	04	Pembahasan APBD Perubahan	-	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	-	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Dokumen	-	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.050.000.000	7



4	02	02	2.02	05	Pembahasan Laporan Semester	-	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	-	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Dokumen	-	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.050.000.000	7
4	02	02	2.02	06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	-	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	-	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Dokumen	-	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.050.000.000	7
4	02	02	2.03		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan								0		26.864.096.960	1

4	02	02	2.03	01	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	-	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	-	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	12 Laporan	-	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.689.127.240	3
4	02	02	2.03	02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	-	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	-	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	12 Laporan	-	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.689.127.240	3
4	02	02	2.03	03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	-	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	-	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	12 Laporan	-	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.689.127.240	3

4	02	02	2.03	04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	-	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	-	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	12 Laporan	-	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.689.127.240	3
4	02	02	2.03	06	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	-	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Dokumen	-	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.500.600.000	1
4	02	02	2.03	07	Pengawasan Penggunaan Anggaran	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	-	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Dokumen	-	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.150.000.000	2

4	02	02	2.03	08	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	-	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	-	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Dokumen	-	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.456.988.000	1
4	02	02	2.04		Peningkatan Kapasitas DPRD								0		22.860.900.000	2
4	02	02	2.04	02	Pendalaman Tugas DPRD	-	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	-	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	14 Dokumen	-	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.200.000.000	5

4	02	02	2.04	04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	-	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	-	- Kota Bekasi, Bekasi Timur, Margahayu	-	204 Orang	-	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.521.612.000	2
4	02	02	2.04	05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	-	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	-	- Kota Bekasi, Bekasi Timur, Margahayu	-	54 Orang	-	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	576.000.000	7

4	02	02	2.04	06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	-	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	-	- Kota Bekasi, Bekasi Timur, Margahayu	-	52 Dokumen	-	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	9.978.288.000	9
4	02	02	2.04	07	Penyusunan Program Kerja DPRD	-	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	-	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua	-	3 Dokumen	-	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.585.000.000	1

									Kel/Desa								
4	02	02	2.05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat								0			12.447.800.000	1
4	02	02	2.05	01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	-	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	-	- Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	3 Laporan	-	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	405.975.000	2	

4	02	02	2.05	02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	-	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	-	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	3 Dokumen	-	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.225.000.000	1
4	02	02	2.05	03	Pelaksanaan Reses	-	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	-	- Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	3 Dokumen	-	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	10.816.825.000	1
4	02	02	2.06		Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD								0		3.089.068.000	2



4	02	02	2.06	02	Pengawasan Kode Etik DPRD	-	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	-	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	12 Laporan	-	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.089.068.000	2
4	02	02	2.08		Fasilitasi Tugas DPRD								0		19.202.130.000	1
4	02	02	2.08	01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	-	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	-	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	13 Dokumen	-	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.245.820.000	8
4	02	02	2.08	02	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	-	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	-	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	2 Laporan	-	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	500.000.000	1

4	02	02	2.08	03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	-	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	-	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	3 Dokumen	-	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	9.156.310.000	6
4	02	02	2.08	04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	-	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	-	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	36 Dokumen	-	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.300.000.000	1
<b>TOTAL</b>													<b>0</b>		<b>201.444.734.098</b>	<b>1</b>

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan tahun 2024 yang juga merupakan dokumen operasionalisasi atau penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2024-2026. Renstra tersebut merupakan tindaklanjut dari Rancangan Rencana Pembangunan Daerah Kota Bekasi Tahun 2024-2026.

Terdapat beberapa hal yang mendasari disusunnya RPD Kota Bekasi Tahun 2024-2026 salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang merupakan Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota mengamanatkan untuk dilaksanakan pemilihan kepala daerah serentak secara nasional pada Tahun 2024. Konsekuensi regulasi tersebut terutama bagi daerah yang masa jabatan kepala daerahnya berakhir pada tahun 2022 atau 2023 akan dipimpin oleh Penjabat (Pj.) Kepala Daerah. Artinya, daerah tidak akan memiliki kepala daerah definitif yang baru sampai dengan tahun 2024. Sementara daerah tetap harus memiliki rencana pembangunan jangka menengah daerah yang dalam kondisi normal sejatinya merupakan penjabaran dari visi dan misi kepala daerah. Dalam kondisi tersebut, salah satu yang menjadi konsentrasi terbesar di daerah adalah bagaimana dengan penyusunan dokumen perencanaan jangka menengah daerah yang akan menjadi acuan bagi penyusunan rencana pembangunan tahunannya.

Selain itu menindaklanjuti konsekuensi regulasi tersebut Menteri Dalam Negeri mengeluarkan instruksi kepada Gubernur dan Bupati/Walikota yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2022 atau 2023, melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, agar menyusun dokumen perencanaan pembangunan menengah daerah tahun 2024-2026 yang kemudian disebut dengan Rencana Pembangunan Daerah

(RPD) Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026. Bersamaan dengan itu, kepala perangkat daerah juga diperintahkan untuk menyusun rencana strategis perangkat daerah (Renstra PD) Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota berdasarkan RPD yang ditetapkan.

Walikota Bekasi akan berakhir masa jabatannya pada tahun 2023. Maka Kota Bekasi berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri tersebut harus menyusun RPD. Namun karena periode akhir jabatan kepala daerahnya adalah tahun 2023, maka Kota Bekasi akan menyusun RPD untuk periode Tahun 2024-2026. RPD ini sendiri akan digunakan oleh Pj. Wali Kota Kota Bekasi sebagai pedoman untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah pada periode perencanaan tersebut. Sementara rencana jangka menengah dan rencana tahunan Kota Bekasi untuk tahun 2023, tetap mengacu pada RPJMD Kota Bekasi Tahun 2018-2023 dan dokumen acuan lainnya sebagaimana ketentuan perundang-undangan.

Proses penyusunan RENJA ini memerlukan keterlibatan dari seluruh elemen yang terkait dan berkepentingan dengan organisasi baik dari internal maupun eksternal organisasi. Keterlibatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan komitmen dan motivasi lembaga untuk melaksanakan program dan kegiatan indikatif yang terdapat dalam RENJA Perubahan secara fokus dan konsisten serta meningkatkan akuntabilitas dan pertanggungjawaban terhadap pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan.

Adapun kaidah pelaksanaan RENJA Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2024 antara lain sebagai berikut:

1. Pelaksanaan RENJA Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2024 diarahkan dan dikendalikan langsung oleh Sekretaris DPRD Kota Bekasi;
2. Seluruh komponen bagian, sub bagian pada Sekretariat DPRD Kota Bekasi, agar menyempurnakan Program dan Kegiatan dalam RENJA Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2024 dengan sebaik-baiknya;

3. Program-program yang tercantum dalam RENJA Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2024, diupayakan untuk dilaksanakan seluruhnya dengan memperhatikan prioritas pembangunan serta ketersediaan anggaran;
4. RENJA Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2024 disusun dengan pendekatan prestasi kerja yang akan dicapai dan harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD);
5. Agar RENJA Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2024 dapat dilaksanakan dan memberikan hasil yang diharapkan, maka setiap komponen Sekretariat DPRD Kota Bekasi diharapkan mengupayakan penguatan peran stakeholder dalam mendukung pelaksanaan pencapaian target-target RENJA Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2024, baik kepada seluruh komponen aparat yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi, Instansi terkait maupun masyarakat luas;
6. Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan RENJA Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2024, dipandang perlu untuk melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RENJA Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2024, sebagai berikut:
  - a. Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dilakukan oleh masing-masing bagian;
  - b. Sekretaris DPRD Kota Bekasi Kota Bekasi menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing bidang sesuai dengan tugas dan kewenangannya;
  - c. Kepala Bagian melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan RENJA bagian periode sebelumnya;
  - d. Sekretaris DPRD Kota Bekasi menyusun evaluasi RENJA berdasarkan hasil evaluasi bagian-bagian sebagaimana dimaksud pada huruf (c);
  - e. Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf (d) menjadi bahan bagi penyusunan Renja untuk periode berikutnya;

- f. Apabila terjadi perubahan kebijakan daerah maupun kebijakan nasional selama tahun 2024, Sekretariat DPRD Kota Bekasi akan melakukan perubahan-perubahan demi kesempurnaan Rencana Kerja Perubahan ini.

Ditetapkan di Bekasi

pada tanggal 2023

**SEKRETARIS DPRD KOTA BEKASI,**



**Drs. HANAN, M.Si**

**Pembina Utama Madya**

**NIP. 19640424 199011 1 002**